

### Kasus Pemasangan Portal di Jalan Desa Silau Rakyat - Jalan Pergulangan Serdang Bedagei Akhirnya Sampai ke Presiden SBY

#### Medan (SIB)

Kasus pemasangan portal (palang besi cor permanen) yang dibangun satu perusahaan perkebunan swasta di Jalan Desa Silau Rakyat - Jalan Pergulangan, Serdang Bedagei yang membuat masyarakat terisolir, akhirnya sampai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta sejumlah petinggi negara di Jakarta, antaranya Kapolri Jendral Pol Sutanto, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dan lainnya untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. "Saya secara khusus dapat perintah dari Front Komunikasi Indonesia (FKI) untuk mempelajari kasus tersebut hingga harus ke Serdang Bedagei, Sumut, ini guna membantu menyelesaikan secara hukum yang berlaku seadil-adilnya," ujar Ketua Umum FKI 1 M Julian Manurung di Bandara Polonia, Medan, Senin (17/1) usai menemui sejumlah pejabat penting di Mapoldasu dan Kejatisu. "Saya menyampaikan surat dari masyarakat Serdang Bedagei, khususnya mereka yang berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan sehubungan kasus tersebut," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, satu perusahaan perkebunan memasang portal di jalan desa tersebut di atas. Oleh warga, portal dicabut karena keberadaannya membuat warga terisolir. Pencabutan, selain untuk kepentingan umum, juga karena izin pemasangan tak ada, apalagi sejumlah surat dari aparat kecamatan dan desa yang mengatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan masyarakat. Penegasan tersebut dikuatkan dengan surat, seperti yang ditegaskan Camat Sei Rampah Drs Nasrul Aziz Siregar melalui surat tertanggal 14 Februari 2006, Kepala Desa Silau Rakyat Muchtar Sipayang tertanggal 10 Februari 2006, Kepala Desa Pergulangan Mariono melalui suratnya tertanggal 11 Februari 2006, mantan Kepala Desa Pergulangan Untung melalui surat tertanggal 11 Februari 2006 termasuk surat dari

LKMD dan BPD Desa Silau Rakyat. Dengan adanya rekomendasi surat itu, untuk maksud membuka dari keterisoliran antar desa, masyarakat membuka portal tersebut. Tetapi, karena membuka portal, pihak perkebunan swasta melaporkan ke polisi hingga tujuh orang warga ditahan.

Tetapi, menurut Julian Manurung, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian yang dilimpahkan ke Kejaksaan ada pasal yang tidak ada kaitan langsung dengan kasusnya yakni para tersangka dikenai menyalahi pasal 170 KUHP yakni pengeroyokan. "Benda mati atau portal yang dicabut bukan pengeroyokan," tandas Julian Manurung.

Atas kasus yang dihadapi warga, perwakilan warga yang menyampaikan persoalan kepada FKI 1 Sumut (dipimpin) Drs H Z Dasopang yang difasilitasi sekretaris FKI 1 Serdang Bedagei Mohammad Nur, surat disampaikan ke sejumlah instansi termasuk Presiden SBY. Surat tersebut kemudian direkomendasikan ke FKI 1 untuk ditindaklanjuti. "Saya sebagai pimpinan ormas FKI 1 punya tanggung jawab moral menuntaskan kasus tersebut hingga selesai demi tegaknya hukum dan hukum menjadi panglima serta dalam maksud memberdayakan ekonomi masyarakat. Portal yang dibangun di atas jalan umum di serdang Bedagei tersebut membuat nilai ekonomis perkebunan warga di daerah itu, anjlok. Soalnya, tidak ada lalu lintas yang dekat," tandas Julian Manurung.

FKI 1, menurutnya, adalah ormas yang dibentuk untuk maksud mendukung kemenangan SBY - JK pada saat jelang pemilihan legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Di pusat, SBY dan JK duduk sebagai Dewan Pembina Utama FKI 1. "Tetapi, baik sebagai dewan pembina dan sebagai pimpinan negara, Pak SBY ingin kasus ini selesai sesuai hukum yang berlaku," tandas Julian Manurung didampingi Z Dasopang dan M Nur. (sib)